



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENINGKATAN PERAN *FINTECH* DALAM PEREKONOMIAN DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN NASIONAL

Venti Eka Satya

Analisis Legislatif Ahli Madya
venti.satya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), berkolaborasi menghadirkan program edukasi tahunan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2022. Perhelatan yang digelar di Yogyakarta ini ditutup pada tanggal 12 Desember 2022. Acara ini diawali dengan digelarnya 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) yang merupakan forum pertemuan para pimpinan lembaga keuangan, asosiasi, dan pelaku *fintech* lokal dan mancanegara. BFN dan IFS 2022 ini fokus pada upaya pemulihan ekonomi nasional dengan mengusung tema '*Moving Forward Together: The Role of Digital Finance & Fintech in Promoting Resilient Economic Growth and Financial Stability*'. Rangkaian BFN tahun ini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari masyarakat, di mana terdapat peningkatan partisipasi sebesar 36% dibandingkan partisipasi tahun lalu. Peningkatan tersebut menjadikan seluruh peserta yang mencakup partisipasi dalam melihat, menyaksikan, dan mengikuti seluruh rangkaian BFN menjadi 1,5 juta peserta. Selain itu program tersebut juga menawarkan 232 lowongan pekerjaan dari perusahaan *fintech* Indonesia.

Dalam Presidensi G20, dunia telah mengakui transformasi digital Indonesia. Industri *fintech* telah menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi dimasa pemulihan ekonomi nasional pascapandemi melalui *fintech lending*. *Fintech lending* telah berhasil menjangkau akses pembiayaan bagi masyarakat yang *unbankable* dan *underserved*. *Fintech lending* telah menyalurkan pendanaan sekitar Rp476,89 triliun kepada 92,4 juta penerima pinjaman. Hal ini tentunya akan meningkatkan inklusi keuangan dan memperkecil kesenjangan kredit sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Hal yang terpenting dalam digitalisasi adalah aktivitas, risiko, dan regulasi serta supervisi. Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa terdapat lima langkah penting untuk mendigitalisasi Indonesia, yaitu; 1) Satu bahasa layanan pembayaran dan jasa keuangan melalui QRIS yang telah mencapai 30 juta pengguna, Standar Nasional Open API (SNAP) dengan 87 jenis layanan yang akan terus diperluas, dan pengaturan data yang mencakup data publik, kontraktual, dan privat; 2) Satu bangsa melalui pengaturan konsolidasi industri jasa pembayaran yang berbasis kluster sehingga terbangun kolaborasi dalam ekosistem pembayaran bank dan nonbank untuk berkompetisi secara global; 3) Satu nusa melalui 3i yaitu interkoneksi, interoperabilitas dan integrasi pada pasar uang dan operasi moneter, BI-FAST dengan RTGS dan GPN; 4) Pembentukan *market conduct* dan *pricing policy* untuk persaingan industri sehat; dan 5) Digital rupiah yang akan mencakup penerbitan, pemusnahan dan transfer antarbank. Saat ini BI tengah menjajaki teknologi untuk Rupiah Digital. Selanjutnya, Rupiah Digital dapat diimplementasikan pada Operasi Moneter dan Pasar Uang. Tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku sistem pembayaran kritical akan menjadi *wholesaler* untuk Rupiah Digital.

OJK mencatat pertumbuhan *outstanding* pembiayaan *fintech peer to peer (P2P) lending* pada Oktober 2022 sebesar 76,8% *yoy*, meningkat Rp0,60 triliun menjadi Rp49,34 triliun. Sementara

itu, tingkat risiko kredit secara agregat tercatat menurun menjadi 2,90%. Namun demikian, OJK mencermati bahwa terdapat tren kenaikan risiko kredit dan penurunan kinerja di beberapa *Fintech P2P Lending*. Pesatnya transformasi digital di sektor jasa keuangan tentunya harus tetap mendukung stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, OJK hendaknya terus melakukan penyempurnaan kebijakan yang akomodatif dalam memitigasi risiko terkait digitalisasi sektor keuangan.

Selain itu, inovasi digital harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memiliki kerangka manajemen risiko yang andal. Salah satu upaya penguatan ekosistem keuangan digital, pada IFS 2022 juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Pengikatan Integrasi antara AFTECH dan AFPI yang disaksikan OJK. Penandatanganan perjanjian pengikatan integrasi ini merupakan bentuk komitmen dalam menciptakan sinergi dan integrasi dalam industri *fintech* guna mendukung terciptanya ekosistem layanan keuangan digital yang bertanggung jawab di Indonesia dan diharapkan dapat memberikan solusi atas isu-isu industri *fintech* di Indonesia. Di bidang Industri Keuangan Nonbank, OJK melakukan penataan industri keuangan berbasis teknologi informasi. Penataan juga dilakukan di sisi perizinan, baik penyempurnaan pada aspek regulasi maupun sistem informasi. OJK telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meninjau lebih lanjut kebijakan moratorium perizinan bagi pelaku usaha *fintech P2P lending*.

Atensi DPR

BFN dan IFS yang baru ditutup pada 12 Desember 2022 ini fokus pada upaya pemulihan ekonomi nasional. Industri *fintech* telah menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi dimasa pemulihan ekonomi nasional pascapandemi melalui *fintech lending*. *Fintech lending* telah berhasil menjangkau akses pembiayaan bagi masyarakat yang *unbankable* dan *underserved*. Hal yang terpenting dalam digitalisasi adalah aktivitas, risiko, dan regulasi serta supervisi. DPR RI perlu mengawasi pelaksanaan industri *fintech* di lapangan, terutama dalam upaya mitigasi risiko. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya risiko potensial yang merugikan konsumen seperti penipuan, penyalahgunaan data klien, pemalsuan tanda tangan digital, dan kejahatan dunia maya lainnya terhadap keamanan data yang rentan perlu diberi atensi. Kehadiran *fintech* juga memiliki risiko terjadinya kasus pencucian dana dan aksi pendanaan untuk terorisme. Hal ini disebabkan oleh lebih mudah dan cepatnya dalam melakukan transaksi keuangan. Untuk itu perlu disusun regulasi yang sifatnya solutif agar *fintech* tetap dapat berjalan dengan aman.

Sumber

antaranews.com, 13 Desember 2022;
beritasatu.com, 12 Desember 2022;
bi.go.id, 23 Agustus 2022;
bisnis.com, 12 Desember 2022;
ojk.go.id, 6 dan 12 Desember 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Dian Cahyaningrum
Nidya Waras Sayekti
Edmira Rivani
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.